

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 ini dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyusun LKIP Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi di Bidang Pekerjaan Umum selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2022 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi. Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 disusun, merupakan gambaran kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kekurangan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bekasi, Januari 2023

**KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKAS**

Drs. H. ABDLLAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199601 1 1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantari	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	vii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan wewenag Organisasi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
1.5 Sistematika Penyajian.....	16
Bab II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Startegis	20
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.....	21
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	21
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Analisis Capaian Indiktor Kinerja Utama.....	34
3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan penganggaran dan Pelaksanaanya.....	34
3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	35
3.2.3.Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunang masyarakat	44
3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum dan reklame).....	51
3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	60
3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
3.3 Realisasi Anggaran.....	68
Bab IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Rencana Tindak.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PerJenis Pendidikan Tahun 2022.....	6
Tabel 1.2 PNS DBMSDA Berdasarkan Golongan Ruang	6
Tabel 1.3 Identifikasi Permasalahan yang ada pada Dinas BMSDA.....	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.....	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2022 (Esellon II).....	22
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Triwulan	24
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas BMSDA	32
Tabel 3.2 Capaian sasaran Strategis 1.....	34
Tabel 3.3 Penilaian LKIP Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2022	34
Table 3.4 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik.....	35
Table 3.5 Data Capaian Jalan Dalam Kondisi Baik.....	36
Tabel 3.6 Perbandingan Target , Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, 2020 dengan Tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik.....	36
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik.....	37
Tabel 3.8 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023	37
Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik.....	38
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Jembatan dalam kondisi baik.....	40
Tabel 3.11 Data Capaian Jembatan dalam kondisi baik	40
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, 2020 dengan Tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	41
Tabel 3.13 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik.....	42
Tabel 3.14 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023	42

Tabel 3.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	43
Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Drainase dalam kondisi baik	44
Tabel 3.17 Data Capaian Drainase dalam kondisi baik	45
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 -Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	45
Tabel 3.19 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	46
Tabel 3.20 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023	46
Tabel 3.21 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	47
Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Polder dalam kondisi baik	48
Tabel 3.23 Data Capaian Polder dalam kondisi baik	49
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 -Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Persentase Polder dalam Kondisi Baik	49
Tabel 3.25 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Polder Dalam Kondisi Baik	50
Tabel 3.26 Data Capaian Kinerja Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik	51
Tabel 3.27 Data Capaian Pedestrian Dalam Kondisi Baik	52
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 -Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Persentase Pedestrian dalam Kondisi Baik ...	52
Tabel 3.29 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik	53
Tabel 3.30 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023	53
Tabel 3.31 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PJU dalam kondisi baik	54
Tabel 3.32 Data Capaian PJU dalam kondisi baik	54
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 -Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Persentase PJU dalam Kondisi Baik	55

Tabel 3.34 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik	55
Tabel 3.35 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023	56
Tabel 3.36 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PJU Dalam Kondisi Baik..	56
Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Reklame dalam kondisi baik.....	58
Tabel 3.38 Data Capaian Reklame dalam kondisi baik	58
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 -Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Persentase Reklame dalam Kondisi Baik.....	58
Tabel 3.40 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik.....	59
Tabel 3.41 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023.....	59
Tabel 3.42 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik	60
Tabel 3.43 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Taman dalam kondisi baik.....	61
Tabel 3.44 Data Capaian Taman dalam kondisi baik	61
Tabel 3.45 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Taman Dalam Kondisi Baik	61
Tabel 3.46 Perbandingan dan Penyesuaian Target dan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 terhadap Tahun sebelumnya	62
Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 terhadap Indikator Kinerja pada level Propinsi dan Nasional	64
Tabel 3.48 Sarana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	65
Tabel 3.49 Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 terhadap Tahun sebelumnya	66
Tabel 3.50 Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)	68
Tabel 3.51 Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2022	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	5
-------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada hasil, (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2021, antara lain :

1. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kota Bekasi, dalam penetapan rencana strategisnya harus selaras (*inlinement process*) dengan rencana strategis Kota Bekasi, berikut ini akan diuraikan cascading penetapan sasaran strategis beserta indikatornya terhadap visi dan misi Kota Bekasi.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. DBMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. DBMSDA Kota Bekasi akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Adapun peran layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi meliputi:

- a. Menyediakan infrastruktur jalan kota yang mantap, aman, efisien, nyaman dan terjangkau;
- b. Meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya air Kota Bekasi;
- c. Meningkatkan pelayanan ketersediaan lampu penerangan jalan umum;

- d. Pengelolaan dan pemeliharaan taman;
- e. Perizinan dan penertiban reklame.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dibagi menjadi 2 (dua) Dinas Yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Tata Ruang, sehingga mulai tahun 2018 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air berdiri sendiri sesuai dengan pembagian kewenangan antara urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum dengan Penataan Ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.



Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

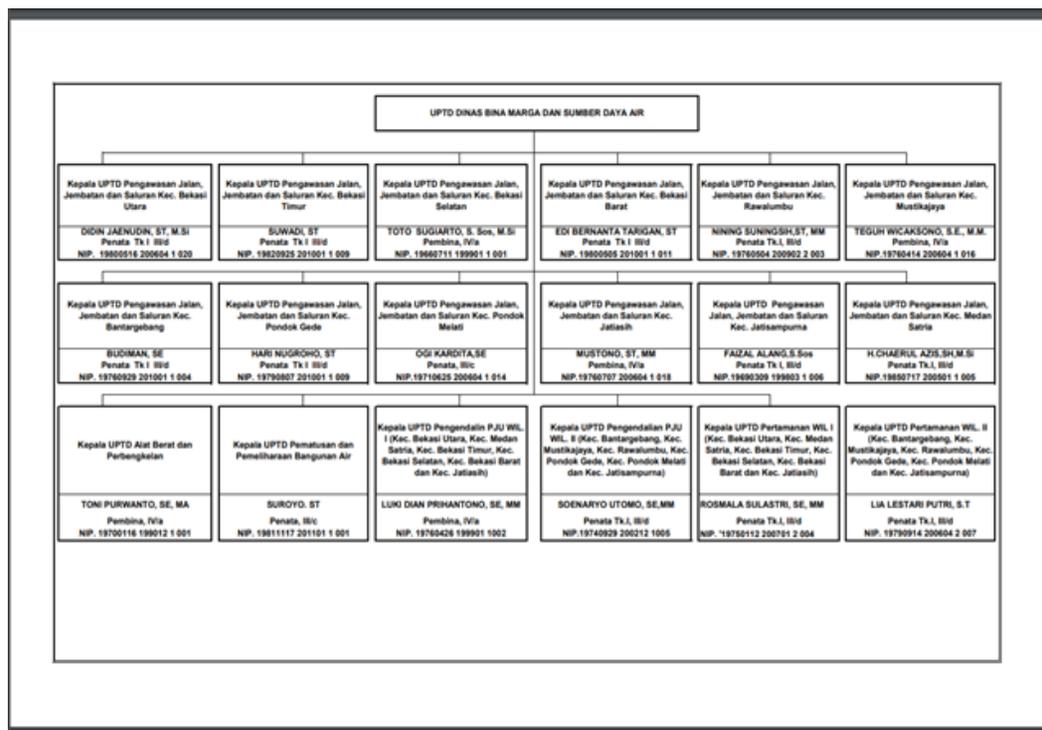
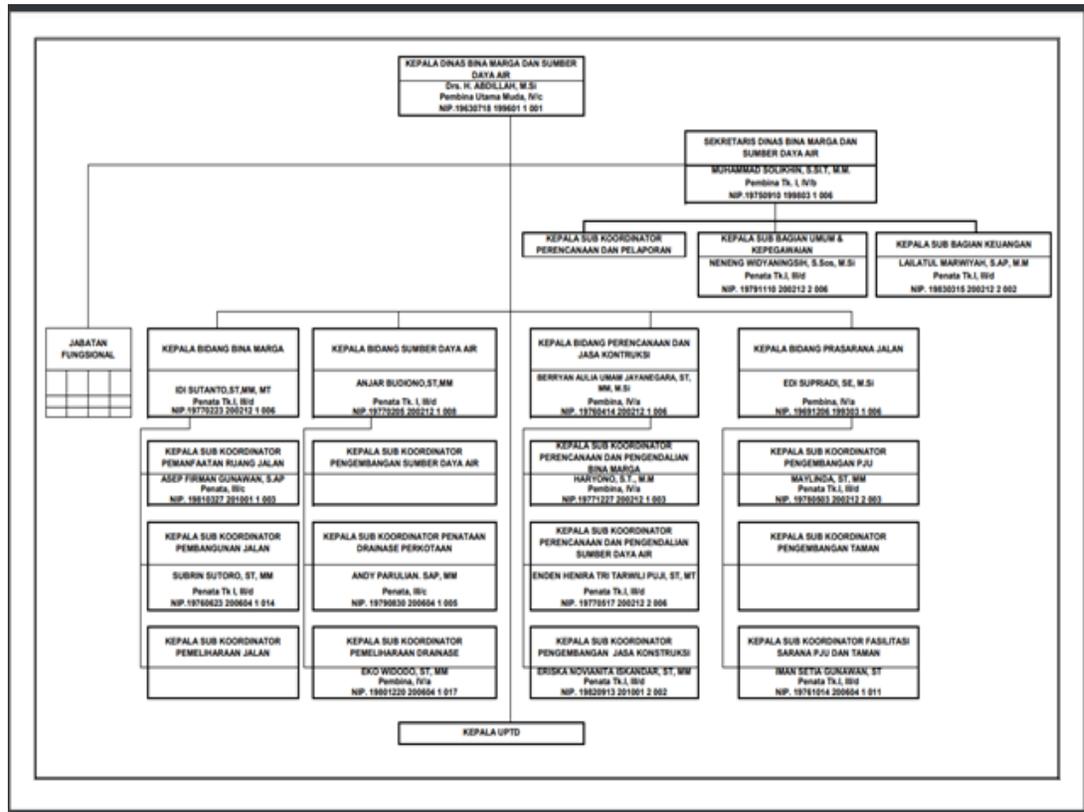
Memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi serta Bidang Prasarana Jalan meliputi pengembangan penerangan jalan umum dan taman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas BMSDA melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Struktur organisasi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi DBMSDA



Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi saat ini memiliki aparat/ personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2022 sebanyak 336 pegawai dengan rincian 139 pegawai negeri sipil dan 197 TKK. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tercantum pada diagram berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Jenis Pendidikan Tahun 2022 (orang)

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S2	29	28	
S1	150	72	79
D 3	14		14
SLTA	122	35	87
SLTP	13	4	9
SD	8	2	6
Jumlah	336	139	197

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DBMSDA Kota

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berpendidikan Strata 1/ sarjana. Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan golongan ruang.

Tabel 1.2
PNS DBMSDA Berdasarkan Golongan Per Desember 2022

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Golongan IV	12 pegawai	8,63
Golongan III	90 pegawai	64,75
Golongan II	36 pegawai	25,90
Golongan I	1 pegawai	0,72
Jumlah	139 pegawai	100

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DBMSDA Kota

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Setelah mengkaji dan membandingkan antara RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019 serta situasi dan kondisi yang ada terhadap tupoksi, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam perumusan isu strategis Kota Bekasi tahun 2018 - 2023 dilakukan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana menggunakan Pendekatan Teknokratis. Pendekatan Teknokratis dilakukan melalui analisis proyeksi perkembangan Kota Bekasi berdasarkan kondisi dan permasalahan pada bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang ada saat ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu, indentifikasi permasalahan yang ada pada DBMSDA Kota Bekasi yang harus ditangani dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Identifikasi Permasalahan yang ada pada Dinas BMSDA

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD	Kinerja PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang memuaskan	Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD
2.	Belum adanya system drainase perkotaan yang terintegrasi	Seringnya terjadi banjir dan genangan pada saat curah hujan cukup tinggi	Belum adanya master plan sistem drainase kota
3.	Kondisi jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia.	Kemacetan tidak dapat dihindari	Kurang tersedianya Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan untuk menunjang kapasitas kendaraan yang terus bertambah
4.	Belum optimalnya sistem pematusan kota sehingga masih ada wilayah yang mengalami genangan;	Terjadinya sedimentasi dan banjir	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
5.	Adanya perubahan peruntukan lahan yang semula kawasan resapan dan konservasi menjadi kawasan terbangun.	Berakibat terjadinya banjir	Kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya payung hukum
6.	Anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan	Program kegiatan tidak berjalan dengan optimal	Belum terlaksananya beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan
7.	Jaminan Kepastian Hukum Atas resiko kerja	Terjadinya kecelakaan	Tidak adanya jaminan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8.	Sarana dan Prasarana	Pekerjaan tidak terlaksana secara optimal	Kurangnya fasilitas yang memadai dan layak guna

Sumber : Renstra Dinas BMSDA Tahun 2018-2023

Permasalahan yang akan di tangani melalui Renstra ditahun mendatang berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintas di wilayah Kota Bekasi dan menimbulkan dampak terhadap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan diantaranya:
- Proyek Double – Double Track (DDT) Jakarta – Cikarang,
 - Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta – Bandung,
 - Proyek Light Rail Transit (LRT) Cawang – Bekasi beserta TOD,
 - Proyek Pembangunan Tol Jakarta – Cikampek (Elevated),
 - Proyek Pembangunan Tol Cimanggis – Cibitung,
 - Proyek Pembangunan Tol Jakarta – Cikampek Sisi Selatan,
 - Pembangunan jalan frontage KCIC,
 - Pembangunan Jaringan jalan, jembatan dan pedestrian akses menuju TOD LRT,
 - Pembangunan Jaringan Jalan terintegrasi dengan Ramp On/Off Jalan Tol Becakayu,
 - Pembangunan Jaringan Jalan terintegrasi dengan Ramp On/Off Jalan Tol Cimanggis – Cibitung,
 - Pembangunan Jaringan Jalan terintegrasi dengan Ramp On/Off Jalan Tol Jakarta – Cikampek Sisi Selatan.
- b. Penataan jaringan utilitas kota
- Pembuatan ducting untuk jaringan kabel utilitas (fiber optic)
- c. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
- d. Penataan pedestrian kota
- e. Penataan Taman Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Taman Median Jalan
- f. Penataan simpang sebidang
- g. Penambahan kapasitas dan panjang jalan
- h. Peingkatan kualitas pelayanan drainase perkotaan
- i. Memaksimalkan fungsi kawasan resapan dan konservasi
- j. Penataan Taman / RTH
- k. Penambahan/ duplikasi crossing dalam rangka pengendalian banjir selatan ke utara

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PD antara lain:

- Sarana dan prasarana pelayanan PD yang kurang memadai
- Kurangnya staf ahli sehingga pelayanan menjadi lambat

- Terkendala sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi dan Bidang Prasarana Jalan.

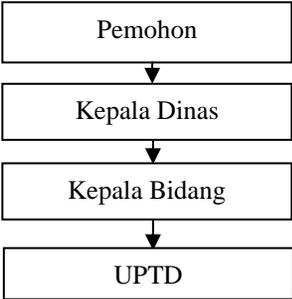
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, maka diselenggarakan beberapa layanan publik yang sudah dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, yaitu:

1. Layanan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

OPD : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Jenis Pelayanan : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

- | | | | |
|---|------------------------|---|--|
| 1 | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Sarana Umum Lainnya yang dilaksanakan Atas Peran Serta Masyarakat atau Pihak Ketiga; 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. |
| 2 | Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan perbaikan penerangan jalan umum 2. Data hasil monitoring 3. Laporan pengaduan melalui medsos |
| 3 | Mekanisme dan Prosedur | : |  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Kepala Dinas] B --> C[Kepala Bidang] C --> D[UPTD] </pre> |

↓

URC/Survei Lokasi

Keterangan :

1. Pemohon menyampaikan surat pemohon
2. Kepala Dinas mendisposisi surat pemohon kepada Kepala Bidang
3. Kepala Bidang mendisposisi surat ke UPTD
4. UPTD survei lokasi untuk melihat kondisi lapangan dan mengajukan permohonan komponen untuk perbaikan ke Gudang
5. URC PJU melaksanakan perbaikan
6. UPTD membuat laporan hasil perbaikan

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 2 (Dua) hari kerja |
| 5 | Biaya / Tarif | : | Tidak ada biaya (Gratis) |
| 7 | Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan | : | Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
- Web, Media Sosial Twitter dan Instagram (@bmsdakotabekasi)
- Telp. (021) 82653941 |
| 8 | Sarana dan Prasarana | : | 1. Komponen PJU
2. Mobil Crane / Mobil Pick Up
3. Tool Kit
4. Gudang
5. Atk
6. Komputer |
| 9 | pengawas Internal | : | - Kepala Dinas
- Kepala Bidang
- Kepala UPTD |
| 10 | Jumlah Pelaksana | : | 40 (empat puluh) orang |
| 11 | Jaminan Pelayanan | : | Pelayanan yang optimal sesuai ketentuan yang berlaku |
| 12 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | : | Penggunaan Peralatan / Perlengkapan Keselamatan kerja selama melaksanakan perbaikan jaminan keselamatan untuk penerima layanan bukan petugas layanan |
| 13 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | : | - Sistem Kerja Aparatur (SIKERJA)
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Laporan kegiatan |

2. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

OPD : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan di wilayah Kota Bekasi

- 1 Dasar Hukum : 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan di Kota Bekasi.

- 2 Persyaratan : 1. Surat permohonan pemanfaatan ruang milik jalan di wilayah Kota Bekasi
2. Gambar konstruksi/ kelayakan konstruksi
3. Peta lokasi/ titik koordinat
4. Foto lokasi

3 Mekanisme dan Prosedur :



Keterangan :

1. Pemohon menyerahkan Surat Permohonan ke DBMSDA Kota Bekasi.
2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala Bidang Bina Marga untuk mengagendakan rapat

- pembahasan, dan memerintahkan untuk melakukan survey ke lokasi yang dimohon.
3. Kepala Bidang menerima Disposisi Kepala Dinas dan memerintahkan acara rapat Pembahasan dan Survei
 4. Kepala Seksi menjadwalkan / mengagendakan rapat pembahasan.
 5. Rapat pembahasan dengan OPD dan instansi terkait atas permohonan rekomendasi.
 6. Melakukan serta membuat Berita Acara.
 7. Pembuatan Rekomendasi Teknis.
 8. Rekomendasi Teknis disampaikan kepada pemohon.
- 4 Jangka Waktu Pelayanan : 7 hari kerja
 - 5 Biaya / Tarif : Tidak ada biaya (gratis)
 - 6 Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan
 - 7 Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
 - Web, Media Sosial Twitter dan Instagram (@bmsdakotabekasi)
 - Telp. (021) 82653941
 - 8 Sarana dan Prasarana :
 1. Formulir Surat Permohonan;
 2. Formulir Kelengkapan Survey Lapangan
 3. ATK
 4. Komputer / Laptop
 5. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Roda 2
 6. Ruang Rapat
 7. Lemari Arsip
 - 9 Pengawas Internal :
 - Kepala Dinas
 - Kepala Bidang
 - Kepala Seksi
 - 10 Jumlah Pelaksana : 6 (enam) orang
 - 11 Jaminan Pelayanan : Pelayanan yang optimal sesuai ketentuan yang berlaku
 - 12 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Suasana tempat pelayanan nyaman dan aman serta sarana ruang rapat yang memadai
 - 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Sistem Kerja Aparatur (SIKERJA)
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Laporan kegiatan

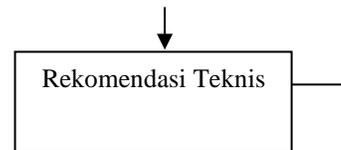
3. Layanan Advis Teknis Peil Banjir

OPD : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Jenis Pelayanan : Advis Teknis Peil Banjir

- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi No. 92/92-PU/XII/2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir di Kota Bekasi;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- 2 Persyaratan : 1. Surat Permohonan
2. Surat Tanah
3. PBB
4. KTP Pemohon
5. Kajian Hidrologi / Penataan Drainas
- 3 Mekanisme dan Prosedur :





Keterangan :

1. Pemohon menyerahkan Surat Permohonan, Surat Permohonan dari pemohon diterima oleh Sekretariat DBMSDA Kota Bekasi kemudian di distribusikan kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air untuk mengagendakan rapat pembahasan, dan memerintahkan untuk melakukan survey ke lokasi yang dimohon.
3. Kepala Bidang menerima Disposisi Kepala Dinas dan memerintahkan acara rapat Pembahasan dan Survey
4. Kepala Seksi menjadwalkan / mengagendakan rapat pembahasan.
5. Rapat pembahasan dengan OPD dan instansi terkait atas permohonan rekomendasi.
6. Melakukan Survey ke lokasi yang dimohon rekomendasi Teknis Peil Banjir serta membuat Berita Acara.
7. Pembuatan / penyelesaian Dokumen Rekomendasi Teknis disertai rapat dan tanda tangan.
8. Rekomendasi Teknis disampaikan kepada pemohon.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 7 (tujuh) hari kerja |
| 5 | Biaya / Tarif | : | Tidak Ada (Gratis) |
| 6 | Produk Pelayanan | : | Surat Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir dan Gambar Rekomendasi |
| 7 | Pelayanan Pengaduan, Saran Dan Masukan | : | Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
- Web, Media Sosial Twitter dan Instagram
(@bmsdakotabekasi) |

- Telp. (021) 82653941
- 8 Sarana Dan Prasarana : 1. Formulir Surat Permohonan;
2. Formulir Kelengkapan Survey Lapangan
3. ATK
4. Komputer / Laptop
5. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Roda 2
6. Ruang Rapat
7. Lemari Arsip
- 9 Pengawasan Internal : - Supervisi Atasan Langsung (Kepala Bidang);
- Supervisi Atasan Langsung (Para Kepala Seksi).
- 10 Jumlah Pelaksana : 8 (delapan) Orang
- 11 Jaminan Pelayanan : Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir yang diterbitkan diberikan secara tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 12 Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan : Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal
- 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana : a. Dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan;
b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 -2023, strategi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bekasi yaitu :

VISI :
“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU,
SEJAHTERA DAN IHSAN”

Visi ini dijelaskan sebagai berikut :

- Bekasi Cerdas** : Menggambarkan Kota Bekasi bukan hanya pintar akan tetapi juga mempunyai kemampuan dan logika yang baik.
- Bekasi Kreatif** : Menggambarkan Kota Bekasi yang memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk menciptakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun

kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya yang menjadikan kota bekasi lebih baik.

Bekasi Maju : menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

Bekasi Sejahtera : menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Bekasi Ihsan : menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban social, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Ditinjau dari sisi pembangunan, secara umum tugas DBMSDA terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka secara khusus tugas dan fungsi DBMSDA berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke 1, 2 dan 5** dari Pemerintah Kota Bekasi yaitu :

MISI 1 :
“ MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.”

MISI 2 ;
“MEMBANGUN, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PRSARANA DAN SARANA KOTA YANG MAJU DAN MEMADAI”

MISI 5 :
MEMBANGUN, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN KOTA YANG AMAN DAN CERDAS, SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN.

2.1.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik pada Dinas BMSDA	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	NA	NA	A	A	A
Meningkatkan Fungsi Jalan	Kemantapan Jalan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	NA	NA	2,35%	2,35%	2,35%
			2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	NA	NA	0,06%	0,76%	0,06%
Meningkatkan Sistem Drainase untuk mengurangi resiko banjir	Ketinggian titik banjir	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	NA	NA	0,32%	0,32%	0,32%
			2. Persentase Polder dalam kondisi baik	NA	NA	1,82%	2,24%	2,24%

Meningkatkan ketersediaan fasilitas penunjang	Kemantapan fasilitas penunjang	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	1. Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	NA	NA	1,34%	1,67%	1,67%
			2. Persentase PJU dalam kondisi baik	NA	NA	1,61%	1,61%	1,61%
			3. Persentase Reklame dalam kondisi baik	NA	NA	25, %	25,00%	25,00%
Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Lingkungan Hidup yang Nyaman di Kota Bekasi	Persentase Taman dalam Kondisi Baik	Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	NA	NA	8,34%	9,96%	11,78%

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di tetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

ASasaran	Indikator	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target			
				2019	2020	2021	2022
1. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	Nilai AKIP Dinas BMSDA dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		-	-	A	A
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Jalan Baru, Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	%	NA	NA	2,35%	2,35%
	2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Jembatan Baru dan Pemeliharaan Jembatan	%	NA	NA	0,06%	0,76%
3. Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	%	NA	NA	0,32%	0,32 %
	2. Persentase Polder dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan dan Pemeliharaan Polder	%	NA	NA	1,82%	2,24%
4. Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang	1. Persentase Pedestrian	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan	%				

infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	dalam kondisi baik	Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyanggah difabel dan lansia dan Pemeliharaan Pedestrian		NA	NA	1,34%	1,67%
	2. Persentase PJU dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan PJU Baru dan Jumlah Pemeliharaan PJU	%	NA	NA	1,61%	1,61%
	3. Persentase reklame dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Penataan dan Pemeliharaan Reklame	%	NA	NA	25,00%	25%
4. Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	Jumlah Persentase Capaian Pembangunan Taman Baru dan Pemeliharaan Taman	%	NA	NA	8,34%	9,96%

Sumber : Renstra Perubahan DBMSDA Tahun 2018-2023

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2022 (Esellon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik pada Dinas BMSDA.	1. Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA			Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	2.35	Triwulan I	0
					Triwulan II	0,78
					Triwulan III	0,78
					Triwulan IV	0,79
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	0.76	Triwulan I	0
					Triwulan II	0,02
					Triwulan III	0,02
					Triwulan IV	0,72

3	Meningkatnya infrastruktur Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	%	0,32	Triwulan I	0,05
					Triwulan II	0,1
					Triwulan III	0,1
					Triwulan IV	0,07
		2. Persentase Polder dalam kondisi baik	%	2,24	Triwulan I	0,3
					Triwulan II	0,6
					Triwulan III	0,6
					Triwulan IV	0,74
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (pedestrian, taman, penerangan jalan umum dan reklame)	1. Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	%	1,67	Triwulan I	0
					Triwulan II	0,4
					Triwulan III	0,4
					Triwulan IV	0,87
		2. Persentase PJU dalam kondisi baik	%	1,61	Triwulan I	0,26
					Triwulan II	0,52
					Triwulan III	0,57
					Triwulan IV	0,26
		3. Persentase Reklame dalam kondisi baik	%	25	Triwulan I	6,25
					Triwulan II	6,25
					Triwulan III	6,25
					Triwulan IV	6,25
5	Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	%	9,96	Triwulan I	1,39
					Triwulan II	2,78
					Triwulan III	2,78
					Triwulan IV	3,01

Sumber : Perkin Esselon 2 DBMSDA Tahun 2022

Untuk alokasi anggaran per triwulan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
ALOKASI ANGGARAN

NO	Nama Program/Kegiatan (2)	Pagu Anggaran (3)	Alokasi Triwulan			
			I (4)	II (5)	III (6)	IV (7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.000.000			Rp. 15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 29.326.470.000	Rp. 7.331.617.500	Rp. 7.331.617.500	Rp. 7.331.617.500	Rp. 7.331.617.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 423.890.000				
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 106.110.000	Rp 76.110.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 25.000.000	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 100.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 30.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 840.000.000	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	Rp 2.100.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.727.942.125	Rp 681.985.531	Rp 681.985.531	Rp 681.985.531	Rp 681.985.531
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 100.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 400.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 75.000.000	Rp 18.750.000	Rp 18.750.000	Rp 18.750.000	Rp 18.750.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp 1.500.000.000		Rp 1.500.000.000		
	- Pembangunan Tanggul Sungai	Rp 2.840.000.000		Rp 2.840.000.000		
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Rp 22.185.000.000		Rp 185.000.000	Rp 22.000.000.000	
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rp 12.211.133.574		Rp 400.000.000	Rp 11.811.133.574	
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp 1.095.000.000		Rp 1.095.000.000		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 1.500.000.000		Rp 1.500.000.000		
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 14.365.000.000		Rp 6.315.000.000	Rp 8.050.000.000	
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp. 116.742.065.347		Rp. 30.025.000.000	Rp. 86.717.065.347	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp. 2.645.000.000		Rp. 845.000.000	Rp. 1.800.000.000	
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp 6.103.942.400			Rp 6.103.942.400	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp. 14.474.500.000			Rp 14.474.500.000	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 613.000.000		Rp 546.605.000	Rp 66.395.000	
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.548.779.529	Rp 15.011.311.882	Rp 32.632.662.882	Rp 17.783.092.882	Rp 15.121.711.882

	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000		
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 500.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp 10.753.970.543	Rp 1.298.490.279	Rp 3.559.156.279	Rp 4.608.282.779	Rp 1.288.041.206
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp 4.490.000.000	Rp 644.655.500	Rp 2.734.096.000	Rp 586.195.500	Rp 525.053.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 2.500.000.000		Rp 1.250.000.000	Rp 1.250.000.000	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 2.322.348.122		Rp 1.161.174.061	Rp 1.161.174.061	

	Pembangunan Jalan	Rp 7.110.000.000	Rp 290.850.000	Rp 1.685.400.000	Rp 5.117.550.000	
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Rp 2.000.000.000	Rp 80.750.000		Rp 1.919.250.000	
	Rekonstruksi Jalan	Rp 114.600.000.000	Rp 4.157.850.000	Rp 29.040.050.000	Rp 73.952.100.000	
	Rehabilitasi Jalan	Rp 2.500.000.000	Rp 102.250.000		Rp 2.397.750.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 20.349.281.009	Rp 6.930.090.860	Rp 269.190.149	Rp 12.950.000.000	Rp 200.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 21.070.000.000	Rp 5.267.500.000	Rp 5.267.500.000	Rp 5.267.500.000	Rp 5.267.500.000
	Pembangunan Jembatan	Rp 2.250.000.000	Rp 93.650.000		Rp 2.156.350.000	
	Pelebaran Jembatan	Rp 1.500.000.000	Rp 60.750.000		Rp 1.439.250.000	
	Rehabilitasi Jembatan	Rp 1.750.000.000	Rp 73.300.000		Rp 1.676.700.000	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Rp 1.000.000.000	Rp 40.750.000	Rp 4.650.000	Rp 954.600.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp 2.000.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp 2.000.000.000		Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.480.000.000	Rp 3.168.000.000	Rp 312.000.000		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bekasi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan realisasi indikator sasaran, Pencapaian Kinerja Program/ kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan mengkaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu terkini.

Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 termasuk Dinas BMSDA dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018- 2023.

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Dalam rangka mengukur peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA		A	BB	
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	2,35	9,67	411,49
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	0,76	1,047	137,76
3	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	0,32	0,4	125
		Persentase Polder dalam kondisi baik	Persen	2,24	0,48	21,43
4	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	Persen	1,67	0,393	23,53
		Persentase PJU dalam kondisi baik	Persen	1,61	2,415	150
		Persentase reklame dalam kondisi baik	Persen	25	25	100
5	Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas	Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	9,96	15,25	153,11

Sumber :Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air,Bidang Sarana Pengembangan Jalan Umum dan Taman Kota Bekasi Tahun 2022.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA dengan capaian kinerja sebesar BB (terlampir).

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat diukur

melaui 2 (dua) indikator yaitu : Pertama Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 411,49 (terlampai), kedua Persentase jembatan dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 137,767 persen (terlampai) maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat diukur melaui 2 (dua) indikator yaitu : Pertama Persentase drainase dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 125 persen (terlampai), kedua Persentase Polder dalam kondisi baik dengan capaian sebesar 21,43 persen maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat belum tercapai.

untuk mencapai sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame), diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : Pertama Persentase Pedestrian dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 23,53 persen (belum tercapai), kedua Persentase PJU dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 150 Persen (terlampai), ketiga Persentase reklame dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 100 persen (belum tercapai) maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame), tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Yang Berkualitas telah menetapkan indikator yaitu Persentase Taman dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 153,11 persen dapat diinterpretasikan sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi pada indikator ini terlampai.

Dengan melihat 9 (indikator) untuk mengukur 5 (lima) sasaran strategis dimana 7 (tujuh) indikator tercapai/ terlampai dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dan Pelaksanaannya.

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1

SASARAN 1	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya			
	2021		2022	
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	A	BB	A	BB

Sumber : Sekretariat Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2022

Merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis “ Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA “. Indikator kinerja ini menggambarkan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU wajib bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapainnya setiap tahun sesuai target RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Bekasi, LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2022 mendapat nilai Akuntabilitas sebesar 79,93 (kategori BB.) dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 3.3 Penilaian LKIP Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2022

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)	23,91
Pengukuran Kinerja (30 %)	23,99
Pelaporan Kinerja (15 %)	12,02
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	20,01
Nilai Hasil Evaluasi	79,93
Tingkat Akuntabilitas Akuntabilitas	BB

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat.

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja Sasaran yaitu (1) Presentase Panjang jalan dalam kondisi baik, (2) Presentase jembatan dalam kondisi baik.

1. Indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan letak geografis dan fungsi Kota Bekasi yang berada di jalur silang yang menghubungkan Ibu kota Negara dengan beberapa daerah penyangga strategis lainnya, sehingga diperlukan daya dukung jalan yang memadai hal ini sesuai dengan data volume lalu lintas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggungjawab pada bidang urusan kebinamargaan.

Jalan dalam kondisi baik yang menjadi target dalam indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik di Kota Bekasi sebesar 2,35 persen. Adapun capaian kinerja indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	%	2,35	9,67	411,49

Sumber :Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Sarana Kota Bekasi Tahun 2022

Dengan melihat table diatas bahwa target tahun 2022 sebesar 2,35 persen, sementara realisasi mencapai 9,67 persen maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik sebesar 411,49 persen, dengan

demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 telah terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Jalan dalam kondisi baik Tahun 2020 , 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Data Capaian Jalan Dalam Kondisi Baik

NO	Jalan Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
1	Pembangunan Jalan	-	0,170 km	2,94 km	1,77 km	turun
2	Pemeliharaan Jalan	80,72 km	49,112 km			
3	Pemeliharaan jalan arteri	-	-	9,56 km	11,62 km	naik
4	Pemeliharaan jalan lingkungan	-	-	98,35 km	451,74 km	naik

Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2019 jalan yang dipelihara sebesar 80,72 km dan untuk tahun 2020 jalan yang dipelihara sebesar 49,112 km terjadi penurunan tetapi pada tahun 2020 terdapat pembangunan jalan baru sebesar 0,17 km.

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan renstra dimana terdapat penyesuaian indikator kinerja dan target indikator kinerja. Pada tahun 2022 untuk Indikator kinerja Jalan dalam kondisi baik dimana target pada tahun 2019 – 2020 sebesar 0,5 persen menjadi 2,35 persen.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator sasaran persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik antara tahun 2019- 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Target , Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, 2020 dengan Tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2019	2020		2021		2022
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	0,5	1,76	1,08	2,35	2,86	2,35	9,67

Sumber : Data Bidang Bina Marga

Indikator kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik terjadi penurunan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019, akan tetapi target terlampaui. Untuk tahun 2022 terjadi perubahan target indikator kinerja Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik dikarenakan terjadi penyesuaian target untuk capaian target tahun 2022 terlampaui.

Adapun factor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menunjang sasaran Dinas yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan.
2. Adanya kegiatan URC dan Sitambal
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian indikator sehingga memudahkan dan mengevaluasi dan mengambil langkah dan tindak lanjut.

Pencapaian indikator persentase Capaian Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 ini didukung oleh capaian program pengelolaan jalan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase Pembangunan Jalan Baru	Persen	95,65	93,46	97,71
2	Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor	Persen	97,09	96,95	99,86
3	Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Persen	72,65	79,28	109,12

Sumber : Bidang Bina Marga 2022

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik. Capaian indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik jika dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
-----------------------------------	--------	---

		2022	2023
Target	Persen	93,9	96,2
Realisasi	Persen	93,9	-

Sumber : Data Olahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan DBMSDA, 2022

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator persentase Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 411,49% dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2023 sebesar 96,2 %, maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah mempertahankan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis, Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama persentase Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	287.858.046.038	260.267.967.881	90,41	
.1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	287.858.046.038	260.267.967.881	90,41	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	2.700.000.000	2.654.051.100	98,30	100
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.722.348.122	2.549.690.408	93,66	100
3	Pembangunan Jalan	10.537.000.000	9.501.103.101	90,17	97
4	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	20.000.000.000	18.560.552.650	92,80	100
5	Rekonstruksi Jalan	172.077.947.879	151.683.055.813	88,15	99,41
6	Rehabilitasi Jalan	21.688.723.028	19.531.455.100	90,05	100
7	Pemeliharaan Berkala Jalan	31.841.781.009	30.040.176.109	94,34	100
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.070.000.000	20.691.282.500	98,20	100
9	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.620.246.000	2.572.574.500	98,18	100
10	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.600.000.000	1.545.757.600	96,61	100

Sumber: Aplikasi Simpelbang Tahun 2022, diolah

1

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 11 (Sebelas) subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp 287.858.046.038,- (*dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat puluh enam ribu tiga pulh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.260.267.967.881,- (dua ratus enam puluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai persentase Panjang jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 90,41 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik sebesar 9,67 % atau dengan capaian kinerja sebesar 411,49 %, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas BMSDA dapat meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Dinas BMSDA melakukan beberapa sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik yaitu:

1. Adanya kegiatan Unit reaksi Cepat (URC)
2. Adanya Kegiatan yang bersumber dari bantuan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa barat.
3. Pada Tahun 2022 Kegiatan lebih banyak pada Pemeliharaan Jalan lingkungan yang mana target 100 km Per tahun realisasi sebesar 451,74 km.

2. Indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan yang berada diatas jalan lalu lintas biasanya disebut viaduct. Jembatan merupakan suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai/saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis dan estetikaarsitektural yang meliputi : Aspek lalu lintas, Aspek teknis, Aspek estetika (Supriyadi dan Muntohar, 2007)

Berdasarkan letak geografis dan fungsi Kota Bekasi yang berada di jalur silang yang menghubungkan Ibu kota Negara dengan beberapa daerah penyangga strategis lainnya, sehingga diperlukan daya dukung jembatan yang memadai hal ini sesuai dengan data volume lalu lintas yang meningkat dari tahun ketahun.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan.

Adapun capaian kinerja indikator Persentase Jembatan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Jembatan dalam kondisi baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	0,76	1,047	137,76

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2022 sebesar 0,76 persen, sementara realisasi mencapai 1,047 persen maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik sebesar 137,76 persen dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Data Capaian Jembatan Dalam Kondisi Baik

NO	Jembatan Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2019 (m)	Realisasi 2020 (m)	Realisasi 2021 (m)	Realisasi 2022 (m)	Ket.
1	Pembangunan Jembatan	-	6,55	18,27	11	turun

2	Pemeliharaan Jembatan	1310	40,50	30.45	139	naik
---	-----------------------	------	-------	-------	-----	------

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat 2 persentase Jembatan dalam kondisi baik hal tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021, Hal ini dikarenakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi mempunyai Tim URC dan SiTambal yang bertugas melayani pengaduan masyarakat dalam hal jalan dan jembatan yang rusak.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Jembatan dalam kondisi baik antara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, Tahun 2020 dengan Tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2019	2020		2021		2022
Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	4,0	30,67	1,10	0,06	0,17	0,76	1,047

Sumber : Data Bidang Bina Marga 2022

Indikator kinerja sasaran Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik, Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya terdapat kenaikan.

Pencapaian indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 ini juga didukung, Dukungan Manajemen sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan setiap bulan Rapat Briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan, juga terhadap kinerja pegawai.
2. Bidang Bina Marga DBMSDA memiliki SITAMBAL dan URC, yaitu suatu sistem yang memudahkan pemantauan Jalan dan Jembatan Yang harus segera di perbaiki Bidang Bina Marga yang bersifat Urgent, sehingga pekerjaan yang sifatnya urgent / membahayakan pengguna jalan dapat terselesaikan lebih efektif dan efisien.

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya dengan pelayanan URC dan SiTambal melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan penyebaran informasi melalui website, dan sosial media.

Solusi dan perbaikan yang seharusnya dilakukan kedepannya adalah dengan menetapkan target sasaran pekerjaan sesuai yang dikerjakan, yaitu bukan hanya dari panjang pekerjaan, kemudian dengan menguatkan koordinasi dengan pihak luar Kedinasan, melanjutkan penyederhanaan administrasi dengan sistem elektronik yang terintegrasi dan mengoptimalkan penyebaran informasi real time dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.13
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase Pembangunan Jembatan Baru	Persen	53,09	58	109,25
2	Persentase Pemeliharaan Jembatan	Persen	92,7	95	102,48

Sumber : Data Bidang Bina Marga 2022

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik. Capaian indikator Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik jika dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	
		2022	2023
Target	Persen	67.64	69,9
Realisasi	Persen	67.64	-

Sumber : Data Olahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan DBMSDA, 2022

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 sebesar 1,047 % dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 69,9%, maka Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-

langkah konkrit dari Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi untuk pencapaian target di tahun berikutnya.

Indikator kinerja Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi harus meningkatkan sinergitas kinerja dengan Dinas teknis terkait dan meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.300.000.000	7.416.927.700	79,75	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Jembatan	4.750.000.000	4.035.706.200	84,96	95
2	Pelebaran Jembatan	1.500.000.000	1.340.022.200	89,33	100
3	Rehabilitasi Jembatan	2.050.000.000	1.102.930.300	53,80	78
4	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.000.000.000	938.269.000	93,83	100

Sumber: Aplikasi Simpelbang Tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 9.300.000.000,- (Sembilan milyar tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.416.927.700,- (tujuh milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan mencapai 79,75 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Indikator Kinerja sebesar 1,047 persen

dari target sebesar 0,76 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 137,76 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien. Dalam Hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan beberapa upaya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yaitu :

1. Penyediaan Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
2. Penyediaan SiTambal Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk mengurangi Jalan2 yang rusak agar tidak melebar.

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat

1. Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014, Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sedangkan Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ditunjuk sebagai dinas yang menyelenggarakan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dan hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik agar Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah tabel Capaian Kinerja Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik.

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Drainase dalam kondisi baik	0,32 %	0,4 %	125 %

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi tahun 2022 yaitu 0,4 % dengan persentase capaian 125 % dari target yang di tentukan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi

kinerja Bidang Sumber Daya Air tahun 2022 telah memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Data Capaian Drainase Dalam Kondisi Baik

NO	Drainase Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
1	Pembangunan Drainase Jalan	34,23 km	1,61 km	7,67 km	13,74 km	Naik
2	Pemeliharaan Drainase Jalan	7,49 km	17,28 km	32,55km	44,87 km	Naik

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Dari analisa data pencapaian kinerja Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 sudah mencapai 100%.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, 2020, 2021 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022
			2019	2020			
Persentase drainase dalam kondisi baik	%	1,0	0,88	0,52	0,32	0,28	0,4

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, yaitu dari 0,88% , Tahun 2022 menjadi 0,4 %. Tetapi untuk capaian realisasi pada tahun 2022 meningkat, dikarenakan target pada tahun 2021 dan 2022 mengalami reviu dari 1,0 persen menjadi 0,32 persen dikarenakan adanya perubahan Renstra Dinas BMSDA dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

faktor pendukung pencapaian antara lain :

1. Komitmen dan koordinasi antar staf, antar Bidang maupun antar OPD yang terus ditingkatkan dalam merencanakan dan melaksanakan program program terkait infrastuktur keairan dan penanganan permasalahan keairan selama tahun 2021.

2. Telah dilaksanakan setiap bulan Rapat dan Briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan, juga terhadap kinerja pegawai.
3. Bidang Sumber Daya Air DBMSDA memiliki SIDALPRO (Sistem Informasi Pengendalian Proyek) yaitu suatu sistem informasi elektronik yang memudahkan pemantauan pelaksanaan tiap proyek di Bidang Sumber Daya Air sejak awal proses pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan lebih efektif dan efisien.
4. Bidang Sumber Daya Air mengeluarkan rekomendasi Peil Banjir untuk pembangunan di Kota Bekasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan Sumber daya Air dan genangan, juga perbaikan fasilitas dan daerah tangkapan air yang ada di daerah pembangunan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya dengan pelayanan Peil Banjir melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan penyebaran informasi melalui website, dan sosial media.

Pencapaian indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2022 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengelolaan Sistem Drainase yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Persentase Pembangunan drainase jalan	Persen	60,24	60,31	100,12
2	Persentase Pemeliharaan drainase	Persen	67,79	68,61	101,21

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Dengan melihat indikator program yang tercapai maupun yang tidak tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik di tahun 2022. Capaian indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik tahun 2022 dikaitkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	
		2022	2023
Target	Persen	64	64,5
Realisasi	Persen	64,22	-

Sumber : Data Olahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan DBMSDA, 2022

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 0,4 % dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 64%. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator utama Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Alokasi dan Realisasi serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	237.537.637.118	222.951.527.632	93,86	
1	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	237.537.637.118	222.951.527.632	93,86	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.700.000.000	1.674.418.675	98,50	100
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	28.832.714.221	27.299.441.151	94,68	100
3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	140.280.991.147	133.288.594.568	95,02	100
4	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	23.257.940.000	22.521.493.775	96,83	100
5	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	18.491.491.750	15.356.235.463	83,04	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	24.974.500.000	22.811.344.000	91,34	100

Sumber: Aplikasi Simpelbang Tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 237.537.637.118,- (dua ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapab belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 222.951.527.632,- (dua ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik mencapai 95,86 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik sebesar 0,4 persen dari target sebesar 0,32 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 125 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien.

2. Indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik

Topografi Kota Bekasi adalah area datar rendah. Kota Bekasi dibatasi oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta sehingga tidak memiliki area hilir sehingga perlunya fasilitas tambahan untuk mencegah terjadinya banjir dengan pembangunan drainase yang baik serta polder - polder pada area rendah rawan banjir. Untuk indikator Persentase Polder dalam kondisi baik merupakan indikator baru setelah dilakukan perubahan RPJMD dan Renstra Dinas BMSDA Tahun 2028-2023.

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Polder Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Polder dalam kondisi baik	2.24	0.48	21.43

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2022 belum tercapai.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Dinas BMSDA terutama indikator yang tidak terpenuhi pada tahun 2022 dapat dilakukan upaya rencana aksi sebagai berikut:

1. Dinas BMSDA mengusulkan pembangunan tampungan air atau polder di wilayah - wilayah yang sering terdampak banjir
2. Menjalin kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta.

Tabel 3.23
Data Capaian Polder Dalam Kondisi Baik

NO	Drainase Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
1	Persentase Pembangunan Polder	-	0.22	
2	Persentase Pemeliharaan Polder	-	0.172	

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Dari analisa data pencapaian kinerja Indikator Persentase Polder dalam Kondisi Baik, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 tidak mencapai target.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi 2021	Target	Realisasi 2022
Persentase Polder dalam kondisi baik	%	1.82	0	2.24	0.48

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Persentase Polder dalam Kondisi Baik pada Tahun 2021 mengalami refocusing sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dan pada tahun 2022 target belum tercapai.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator utama Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Alokasi dan Realisasi serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk
Indikator Kinerja Utama Persentase Polder Dalam Kondisi Baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60.020.469.808,00	52.330.227.535,00	87.19	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.020.469.808,00	52.330.227.535,00	87,19	
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.500.000.000	1.454.181.030	96,95	100
2	Pembangunan Tanggul Sungai	3.294.000.000	3.149.647.520	95,62	100
3	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	22.834.158.000	20.302.651.000	88,91	100
4	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	31.297.311.808	26.449.186.985	84,51	100
5	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.095.000.000	974.561.000	89,00	100

Sumber: Aplikasi Simpelbang Tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Polder Dalam Kondisi Baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 60.020.469.808,- (enam puluh milyar dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 52.330.227.535,- (lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus duapuluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase polder Dalam Kondisi Baik mencapai 87,19 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Polder Dalam Kondisi Baik sebesar 0.48 persen dari target sebesar 2.24 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 21.43 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Adapun langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Polder Dalam Kondisi Baik adalah melakukan review indikator sasaran dan indikator program.

3.2.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)

1. Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perencanaan teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang difable, hal ini karena pejalan kaki dan penyandang difable merupakan bagian dari lalu lintas. Fasilitas pejalan kaki dan penyandang difable merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain dapat berupa trotoar dan penyebrangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan dan/atau di bawah jalan.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ditunjuk sebagai dinas yang menyelenggarakan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Jalan, dan hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Pemanfaat Ruang Jalan yang dimaksud salah satunya adalah penataan dan pengembangan pedestrian.

Pedestrian adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat di titik asal (origin) ke tempat lain sebagai tujuan (destination) dengan berjalan kaki (Rubenstein,1992).

Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik agar Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Jalan dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah tabel Capaian Kinerja Indikator Persentase Pedestrian yang Ramah Bagi Pejalan Kaki, Penyandang Difable dan Lansia

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	1.67	0.393	23.53

Sumber : Bidang Bina Marga (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian tahun 2022 yaitu sebesar 1.183 m, dengan persentase capaian 23.53 % dari target yang di tentukan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Bidang Bina Marga tahun 2022 belum memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan.

Tabel 3.27
Data Capaian Pedestrian Dalam Kondisi Baik

NO	Pedestrian Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
1	Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel dan lansia	1176 m	150 m	1.008 m	404 m	turun
2	Pemeliharaan Pedestrian	-	-	3046 m	770.9 m	turun

Sumber : Bidang Bina Marga (2022)

Dari analisa data pencapaian kinerja Indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik diketahui bahwa pada Tahun 2022 belum mencapai target, Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, terjadi terjadi penurunan.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 - Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Persentase Pedestrian dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Realisasi
			2019	2020		2021	Target	
Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	%	0,5	1,76	0,23	1,34	1,66	1,67	0,393

Sumber : Bidang Bina Marga (2022)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja sasaran Persentase Pedestrian Dalam Kondisi baik pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021, yaitu dari 1.66 persen menjadi 0.393 persen. Faktor penghambat antara lain :

1. Komitmen dan koordinasi antar staf, antar Bidang maupun antar OPD yang terus ditingkatkan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program terkait infrastuktur keairan dan penanganan permasalahan keairan selama tahun 2022.
2. Telah dilaksanakan setiap bulan Rapat dan Briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan.
3. Ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan SDM dan peralatan pendukung.

4. Dukungan Pimpinan Daerah Peraturan Wali Kota Bekasi No.58 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi.

Pencapaian indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2022 ini didukung oleh indikator capaian Program Penyelenggaraan Jalan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Persentase Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel dan lansia	Persen	20.08	19	94.62
2	Persentase Pemeliharaan Pedestrian	Persen	83.05	80	96.33

Sumber : Bidang Bina Marga (2022)

Dengan melihat indikator program yang tercapai maupun yang tidak tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik di tahun 2022. Capaian indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik tahun 2022 dikaitkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.30
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik	
		2022	2023
Target	Persen	52,39	54,1
Realisasi	Persen	51,43	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Umum DBMSDA, 2022

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 0.393% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 54,1%. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah cukup mencapai target namun harus tetap bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan

2. Indikator Persentase PJU dalam Kondisi Baik

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan terhadap Indikator Persentase PJU dalam kondisi baik

Adapun capaian kinerja Indikator Persentase PJU dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PJU dalam kondisi baik	1,61 %	2.41 %	150 %

Sumber : Data Bidang Sarana Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman, 2022

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2022 sebesar 1,61 persen, sementara realisasi mencapai 2,41 persen maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik sebesar 150 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Jalan dalam kondisi baik Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Data Capaian PJU Dalam Kondisi Baik

NO	Jalan Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
1	Peningkatan Pembangunan PJU Baru	0,91	0,42	52,72	54.94	Naik
2	Pemeliharaan PJU	45,75	57,79	20	20	Naik

Sumber : Data Bidang Sarana Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman, 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 PJU Baru sebesar 0.91 % dan untuk Tahun 2020 0.42% terjadi penurunan akan tetapi pada tahun 2021 ada kenaikan pada PJU Baru sebesar 52,72 %, untuk Pemeliharaan PJU sebesar 20 %, pada tahun 2022 ada peningkatan pada PJU baru sebesar 54,94 % dan Pemeliharaan PJU sebesar 20 %.

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan renstra dimana terdapat penyesuaian indikator kinerja dan target indikator kinerja.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator sasaran persentase PJU dalam kondisi baik antara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019- Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022
			2019	2020			
Persentase utilitas dalam kondisi baik	%						
1. PJU Baru		1,5	0,91	0,42	53,3	-	54,94
2. PJU dipelihara		20	47,57	57,79	11250 titik	-	11250 titik
Persentase PJU dalam kondisi baik		-	-	-	1,61	1,93	2,415

Sumber : Data Bidang Prasarana Jalan, 2022

Pencapaian indikator persentase Capaian PJU Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 ini didukung oleh capaian program penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan strategis sebagai berikut :

Tabel 3.34
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	Persen	53,3	54,94	103,08
2	Presentase Pemeliharaan PJU	titik	11250	11250	100

Sumber : Data Bidang Prasarana Jalan, 2022

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PJU dalam kondisi baik. Capaian indikator Persentase PJU dalam kondisi baik jika dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PJU Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PJU Dalam Kondisi Baik	
		2021	2023
Target	Persen	71,78	73,39
Realisasi	Persen	71,78	

Sumber : Data Olahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan DBMSDA, 2022

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase PJU Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 2,415 % dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 73,39 %. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah mencapai target namun harus tetap bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis, Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PJU dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PJU dalam kondisi baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	86.963.779.529,00	79.514.066.745,00	91,43	100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	86.963.779.529	79.514.066.745	91,43	100
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	4.228.000.000	4.000.760.282	94,63	100
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur	82.535.779.529	75.314.342.463	91,25	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
	Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota				
3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	198.964.000	99,48	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PJU dalam kondisi baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 86.963.779.529,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 79.514.066.745,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase utilitas dalam kondisi baik hanya mencapai 91,43 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase pju dalam kondisi baik sebesar 2,415 % atau dengan capaian kinerja sebesar 150%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas BMSDA dapat meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Dinas BMSDA melakukan beberapa sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase PJU dalam kondisi baik yaitu:

1. Adanya kegiatan Rutin pemeliharaan PJU
2. Adanya kegiatan monitoring yang terus dilakukan

3. Indikator Persentase Reklame Dalam kondisi Baik

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan terhadap Indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik.

Adapun capaian kinerja Indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37

Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Reklame dalam kondisi baik	25 %	25 %	100 %

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2022

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2022 sebesar 25 persen, sementara realisasi mencapai 25 persen maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik sebesar 25 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 tercapai Untuk melihat perbandingan capaian Jalan dalam kondisi baik Tahun 2019- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Data Capaian Reklame Dalam Kondisi Baik

NO	Jalan Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Ket.
1	Pemeliharaan Reklame	0,91	0	1 buah	8	Naik

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Pemeliharaan Reklame sebesar 0.91 % dan untuk Tahun 2020 0 % terjadi penurunan akan, Tetapi pada tahun 2021 ada kenaikan pemeliharaan reklame sebesar 12,52 %, pada tahun 2022 terjadi kenaikan 100 %.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator sasaran persentase PJU dalam kondisi baik antara tahun 2019-2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, - Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022
			2019	2020			
Persentase Reklame dalam kondisi baik		25 %	25	12,5	25 %	3,13%	25%

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, dikarenakan pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian indikator kinerja sasaran dan target indikator.

Pencapaian indikator persentase Capaian reklame Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 ini didukung oleh capaian program penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan strategis sebagai berikut :

Tabel 3.40
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Persentase Reklame Dalam Kondisi baik	Persen	25	25	100

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2022

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Reklame dalam kondisi baik. Capaian indikator Persentase Reklame dalam kondisi baik jika dikaitkan dengan target akhir tahun Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PJU Dalam Kondisi Baik	
		2022	2023
Target	Persen	25	50
Realisasi	Persen	25	

Sumber : Data Olahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan DBMSDA, 2022

Jika melihat pada tabel di atas, capaian indikator Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 yang dapat direalisasikan adalah sebesar 25 % dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 50 %. Maka, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi belum mencapai target.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Reklame dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Reklame dalam kondisi baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)100		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.530.011.000	3.365.501.310	95,34	100
1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3.530.011.000	3.365.501.310	95,34	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	3.530.011.000	3.365.501.310	95,34	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Reklame dalam kondisi baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 3.530.011.000- (tiga milyar lima ratus tiga puluh juta sebelas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.365.501.310,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus seribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase reklame dalam kondisi baik mencapai 95,34%,.

Sasaran Strategis 5 : Membangun, meningkatkan dan Mengembangkan Lingkungan Hidup yang Nyaman di Kota Bekasi

1. Indikator Persentase Taman dalam kondisi baik

Pembangunan suatu wilayah perkotaan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satu cara untuk dapat mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan salah satu atribut green city yaitu ruang terbuka hijau (RTH).

Berdasarkan letak geografis dan fungsi Kota Bekasi yang berada di jalur silang yang menghubungkan Ibu kota Negara dengan beberapa daerah penyangga strategis lainnya, sehingga diperlukan daya dukung jalan yang memadai, hal ini sesuai dengan data volume lalu lintas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui PeraturanWali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan.

Adapun capaian kinerja indikator Persentase Taman dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Taman
Dalam Kondisi Baik di Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Taman dalam kondisi baik	9,96	15,25	153,11

Sumber : Data Bidang Parsarana Jalan, 2022

Dengan melihat tabel diatas bahwatarget tahun 2022 9,96 persen, sementara realisasi mencapai 15,25 persen maka capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator Persentase Taman Dalam Kondisi Baik sebesar 153,11 Persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 telah terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Persentase Taman Dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.44
Data Capaian Taman Dalam Kondisi Baik

NO	Persentase Taman Dalam Kondisi Baik	Realisasi 2022	Ket.
1	Persentase Pembangunan Taman baru	22,51	
2	Persentase Pemeliharaan Taman	107,72	

Tabel 3.45
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Taman dalam kondisi baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	19.290.567.443	17.911.473.152	92,85	100
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	19.290.567.443	17.911.473.152	92,85	100
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	500.000.000	396.996.000	79,40	100
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	14.300.567.443	13.631.676.073	95,32	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI (Rp)		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.490.000.000	3.882.801.079	86,48	100

Sumber: Aplikasi Simpelbang Tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Taman dalam kondisi baik, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 19.290.567.443- (sembilas belas milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 17.911.473.152,- (tujuh belas milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Taman dalam kondisi baik hanya mencapai 92,85 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Taman dalam kondisi baik sebesar 153,11 % atau dengan capaian kinerja sebesar 15,25%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja terlampaui dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas BMSDA dapat meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Dinas BMSDA melakukan beberapa sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Presentase kecukupan ruang terbuka hijau yaitu:

1. Adanya kegiatan Rutin pemeliharaan taman
2. Adanya kegiatan monitoring yang terus dilakukan

Tabel 3.46
Perbandingan dan Penyesuaian Target dan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 terhadap Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020		Indikator Kinerja	2022		Keterangan
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			Nilai Sakip	A	BB	
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0.50%	1.76%	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	0,32 %	9,96 %	indikator kinerja dan capaian sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas BMSDA dapat dihitung
Persentase jembatan dalam kondisi baik	4%	30.76%	Persentase jembatan dalam kondisi baik	0,76 %	1,047%	

Indikator Kinerja	2020		Indikator Kinerja	2022		Keterangan
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Drainase dalam kondisi baik	1%	0,52%	Persentase Drainase dalam kondisi baik	0,32%	0,4%	sebagai capaian indikator kinerja perangkat daerah
			Persentase Polder dalam kondisi baik	2,24%	0,48%	Penambahan indikator baru sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas BMSDA dapat dihitung sebagai capaian indikator kinerja perangkat daerah
Persentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difable dan lansia	0,5%	0,23%	Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	1,67%	0,393%	Penyesuaian target indikator kinerja
Persentase utilitas dalam kondisi baik	11,9 %	17,05%	Persentase PJU dalam Kondisi baik	1,61%	2,415%	penyesuaian dari 1 Indikator tahun 2018-2020 menjadi 2 Indikator pada tahun 2021 - 2023 untuk fokus pada pengukuran yang merupakan hasil dari <i>root causes analysis</i>
			Persentase Reklame dalam kondisi baik	25 %	25%	
Persentase kecukupan ruang terbuka hijau	0,006%	1,11%	Persentase Taman dalam kondisi baik	9,96%	15,25%	penyesuaian indikator kinerja dan capaian sehingga semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas BMSDA dapat dihitung sebagai capaian indikator kinerja perangkat daerah

Sumber :LKIP 2020 dan Data Capaian 2022 DBMSDA Kota Bekasi

Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja pada Renstra periode sebelumnya (2013-2018). Dan perbaikan dituangkan ke dalam Renstra periode 2018-2023. Penyesuaian indikator kinerja 2021 juga dilakukan untuk menyelaraskan kinerja DBMSDA terhadap kinerja instansi pada level propinsi dan nasional sesuai dengan bidang tugas yang diemban.

Tabel 3.47
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2022 terhadap Indikator Kinerja pada level Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja DBMSDA Kota Bekasi	2022		Program DBMPR Jabar Terkait	Program DSDA Jabar Terkait	Misi KemenPUPR Terkait
	Target	Realisasi			
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	2,35 %	9,96 %	Tingkat Kemantapan Jalan	-	Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem.
Persentase jembatan dalam kondisi baik	0,76 %	1,047 %	Tingkat aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun	-	
Persentase drainase dalam kondisi baik	0,32 %	0,4 %	Tingkat Kemantapan Jalan	kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian banjir di Jawa Barat	Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Persentase Polder dalam kondisi baik	2,24 %	0,48 %			
Persentase pedestrian dalam kondisi baik	1,67 %	0,393 %	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing		
Persentase PJU dalam kondisi baik	1,61 %	2,415 %	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang efisien,		

			berkelanjutan dan berdaya saing		
Persentase reklame dalam kondisi baik	25 %	25 %			
Persentase taman dalam kondisi baik	9,96 %	15,25 %	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Program bina operasi dan pemeliharaan sumber daya air	

Sumber :RENSTRA Prov Jawa Barat 2018-2023 dan RENSTRA KEMEN PUPR 2015-2020

3.2.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun anggaran 2022, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas BMSDA Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 139 orang Aparatur Sipil Negara dan 197 orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2022 dengan realisasi fisik sebesar 98,55 % dan realisasi keuangan sebesar 91,29 % .

Dinas BMSDA Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Sarana Kerja, beberapa Sarana kerja yang dimiliki oleh Dinas BMSDA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48

Sarana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Uraian	Jumlah Barang			Satuan	Ket.
		Baik	Rusak	Rusak Berat		
1	Tanah dan Bangunan	2,275			M2	Workshop
2	Gedung	1			Unit (2 Lantai) M2	Workshop
3	Listrik	13			Jaringan	
4	Telpon	1			Line (1 Fax)	
5	Area Parkir	1			Area	
6	Ruang Rapat	1			Ruang	

7	Ruang Arsip	2			Ruang	
8	Kendaraan Roda 4	44		5	Unit	
9	Kendaraan Roda 2	39		5	Unit	
10	Kendaraan Truck	16			Unit	
11	Meja Rapat	7	4		Set	
13	Ac	25	15		Unit	
14	Komputer Pc	28	5		Unit	
15	Komputer Notebook	22		4	Unit	
10	Printer	33			Unit	
11	Meja Kerja	138	83		Unit	
12	Kursi Kerja	140	85		Unit	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas BMSDA Kota Bekasi tahun 2022

Tabel 3.49
Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
Tahun 2022 terhadap Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Faktor Pendukung		Faktor Penghambat	
	Dalam Rentang Kendali DBMSDA	Diluar Rentang Kendali DBMSDA	Dalam Rentang Kendali DBMSDA	Diluar Rentang Kendali DBMSDA
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan SDM , TIM URC dan peralatan pendukung	Ketersedian anggaran Bantuan dari Provinsi Jawa Barat, Dana DAK, Adanya kerjasama tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah Prov DKI dengan Prov Jawa Barat Di Kota Bekasi No. 22 Tahun 2016 No.119/146/BKSP No.435 Tahun 2016 serta Dukungan Pimpinan Daerah	Pengawasan Aset Ruang Milik Jalan, Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana jalan	adanya bencana alam, adanya pembangunan sarana utilitas lain (listrik dll)
Persentase jembatan	Ketersediaan dokumen	Ketersedian anggaran	pemeliharaan yang rutin	adanya bencana alam,

Indikator Kinerja	Faktor Pendukung		Faktor Penghambat	
	Dalam Rentang Kendali DBMSDA	Diluar Rentang Kendali DBMSDA	Dalam Rentang Kendali DBMSDA	Diluar Rentang Kendali DBMSDA
dalam kondisi baik	perencanaan, ketersediaan SDM dan peralatan pendukung	bantuan dari Provinsi DKI Dukungan Pimpinan Daerah, regulasi terkait		adanya pembangunan sarana utilitas lain (listrik dll)
Persentase drainase dalam kondisi baik	Adanya TIM Pematuan DBMSDA	Ketersediaan anggaran Bantuan dari Provinsi Jawa Barat, Bantuan Prov. DKI, dan Perjanjaian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Pompa dan Pintu Air Milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Berada Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1250 A Tahun 2018	Belum tersedianya dokumen pengendalian banjir, kurang optimalnya fungsi saluran yang ada, Masih banyak saluran yang belum dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain pintu air, alat pompa, dan alat berat	adanya bencana alam, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap saluran.
Persentase pedestrian dalam kondisi baik	Ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan SDM dan peralatan pendukung	Dukungan Pimpinan Daerah PERWAL Kota Bekasi No.58 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi	pemeliharaan yang rutin	adanya bencana alam, adanya pembangunan sarana utilitas lain (listrik dll)
Persentase PJU dalam kondisi baik	Ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan SDM dan peralatan pendukung	Ketersediaan anggaran bantuan dari Provinsi DKI,	pemeliharaan yang rutin	Belum tersedianya ducting untuk pemasangan jaringan utilitas
Persentase Reklame dalam kondisi baik				

Indikator Kinerja	Faktor Pendukung		Faktor Penghambat	
	Dalam Rentang Kendali DBMSDA	Diluar Rentang Kendali DBMSDA	Dalam Rentang Kendali DBMSDA	Diluar Rentang Kendali DBMSDA
Persentase Taman dalam kondisi baik	Ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan SDM dan peralatan pendukung	Ketersedian Dukungan Pimpinan Daerah, regulasi terkait	memerlukan koordinasi dgn dinas terkait (LH,DISTARU)	adanya bencana alam, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara taman

Sumber :Bidang Bidang DBMSDA Kota Bekasi

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam subbab ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Efisiensi menurut Mardiasmo (2009), adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$EFISIENSI = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1994:

Tabel 3.50
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

PRESENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang Efisien

80% - 90 %	Cukup Efisien
60% - 80 %	Efisien
Di bawah dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber :SUB BAG Keuangan DBMSDA Kota Bekasi

Capaian Kinerja pada Dinas BMSDA berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 berjalan sesuai dengan Output dan dengan realisasi fisik rata-rata seluruh program dan kegiatan mencapai 98,55 % dan realisasi keuangan 91,29 %, hasil ini disebabkan karena :

1. Realisasi belanja menyesuaikan kebutuhan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Pengadaan lahan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang belum terlaksana pada tahun 2022, sehingga pekerjaan konstruksinya belum dapat dilaksanakan.

Realisasi Anggaran Belanja Urusan Non Urusan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 3.51
Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2022

Program/ Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	Target	Realisasi	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.094.412.125,00	31.195.448.098,00	91,49	A	BB	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60.020.469.808	52.330.227.535	87,19	0,32 %	0,4 %	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	237.537.637.118	222.951.527.632	93,86	2,24 %	0,48 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	86.963.779.529	79.514.066.745	91,43	1,61 %	2,415%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	296.158.046.038	266.746.626.581	90,07	2,35 %	9,67 %	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.530.011.000	3.365.501.310	95,34	25 %	25 %	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	19.290.567.443	17.911.473.152	92,85	9,96 %	15,25 %	

Sumber : E-monev Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2022 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi tahun 2022 yang diukur dari Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya, (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat (3) Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat, (4) Meningkatnya, ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian , taman, penerangan jalan umum, dan reklame) dan, (5) Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas. Capaian kinerja Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya dengan capaian sebesar BB . Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA dengan target A dan realisasi BB .

Capaian kinerja sasaran strategis (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Presentase Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 2,35 % dan realisasi sebesar 9,67 %.

2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik dengan target 0,76 % dan realisasi sebesar 1,047 %.

Capaian kinerja sasaran strategis (3) Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Presentase Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik dengan target 0,32 % dan realisasi sebesar 0,4 %.
2. Presentase Persentase Polder Dalam Kondisi Baik dengan target 2,24 % dan realisasi sebesar 0,48 %.

Capaian kinerja sasaran strategis (4) Meningkatnya, ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian , taman, penerangan jalan umum, dan reklame). Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik dengan target 1,67 % dan realisasi sebesar 0,393 %.
2. Persentase PJU Dalam Kondisi Baik dengan target 1,61 % dan realisasi sebesar 2,415 %.
3. Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik dengan target 25 % dan realisasi sebesar 25 %.

Capaian kinerja sasaran strategis (5) Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Persentase Taman Dalam Kondisi Baik dengan target 9,96 % dan realisasi sebesar 15,25 %.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi secara keseluruhan dari 5 (Lima) sasaran Strategis, dimana secara seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Capaian Kinerja pada Dinas BMSDA berdasarkan hasil realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan secara umum pada Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang mencapai 98,55% kinerja fisik dan realisasi keuangan sebesar 91,29%.

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya control dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2019 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi tahun 2022 yang diukur dari Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya, (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat (3) Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat, (4) Meningkatnya, ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian , taman, penerangan jalan umum, dan reklame) dan, (5) Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas. Capaian kinerja Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya dengan capaian sebesar BB . Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA dengan target A dan realisasi BB .

Capaian kinerja sasaran strategis (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk menunjang masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Presentase Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 2,35 % dan realisasi sebesar 9,67 %.
2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik dengan target 0,76 % dan realisasi sebesar 1,047 %.

Capaian kinerja sasaran strategis (3) Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Presentase Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik dengan target 0,32 % dan realisasi sebesar 0,4 %.
2. Presentase Persentase Polder Dalam Kondisi Baik dengan target 2,24 % dan realisasi sebesar 0,48 %.

Capaian kinerja sasaran strategis (4) Meningkatnya, ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (Pedestrian , taman, penerangan jalan umum, dan reklame). Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Persentase Pedestrian Dalam Kondisi Baik dengan target 1,67 % dan realisasi sebesar 0,393 %.
2. Persentase PJU Dalam Kondisi Baik dengan target 1,61 % dan realisasi sebesar 2,415 %.
3. Persentase Reklame Dalam Kondisi Baik dengan target 25 % dan realisasi sebesar 25%

Capaian kinerja sasaran strategis (5) Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas Sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Persentase Taman Dalam Kondisi Baik dengan target 9,96 % dan realisasi sebesar 15,25 %.

Capaian Kinerja pada Dinas BMSDA berdasarkan hasil realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan secara umum pada Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang mencapai 98,55 % kinerja fisik dan realisasi keuangan sebesar 91,29%.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian sasaran kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air telah mencapai target yang diinginkan, tetapi ada satu indikator yang tidak mencapai target yaitu (1) Persentase Polder dalam kondisi baik dimana pada tahun 2022 untuk kegiatan/ subkegiatan Pembangunan Polder difocusing sehingga tidak bisa mencapai target.

Solusi dan perbaikan yang seharusnya dilakukan kedepannya adalah

1. Untuk indikator Persentase Polder dalam kondisi baik adalah :
 - Dinas BMSDA mengusulkan pembangunan tampungan air atau polder di wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir

